



Pengaruh Perempuan dalam Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) Terhadap *Agency Cost* Pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI

Kenrick Lafender¹, Annmaria Widyaning Putri², Christine Darmawan³

¹Universitas Katolik Musi Charitas

²Universitas Katolik Musi Charitas

³Universitas Katolik Musi Charitas

Abstrak

Masalah keagenan muncul karena konflik kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Konflik kepentingan antara manajer perusahaan dan pemilik perusahaan menyebabkan terjadinya biaya agensi. Penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa struktur kepemilikan dan direksi dapat mengurangi biaya agensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit yang perempuan terhadap biaya agensi. Agensi sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan ukuran dewan komisaris independen, dewan komisaris, dan komite audit yang perempuan perputaran total aset, rasio beban operasional *asset turnover* dan rasio biaya operasi. Makalah ini didasarkan pada penelitian sebelumnya oleh Ang et al. (1999), Singh et al. (2003) dan Faisal (2004). Sampel penelitian ini terdiri dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2021. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* terdiri dari 156 observasi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dan *analisis bootstrap*. Studi ini menemukan bahwa ukuran dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit wanita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mengurangi biaya agensi. Kepemilikan institusional dan dewan direksi memiliki efek signifikan dalam mengurangi biaya agensi.

Kata Kunci : Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, *Agency Cost*.

Abstract

Agency problems arise because of conflicts of interest between managers as agents and company owners as principals. Conflicts of interest between company managers and company owners cause agency costs. Previous research has shown that ownership structures and directors can reduce agency costs. This study aims to analyze the influence of female independent board of commissioners, board of directors, and audit committee ownership on agency costs. Agency as the dependent variable in this study is measured by the size of the independent board of commissioners, board of commissioners, and female audit committee total asset turnover, operating expense ratio to total asset turnover and operating expense ratio. This paper builds on previous research by Ang et al. (1999), Singh et al. (2003) and Faisal (2004). The research sample consists of companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2019-2021. The sampling method used in this study was a purposive sampling method consisting of 156 observations. Hypothesis testing using multiple regression analysis and bootstrap analysis. This study found that the size of independent commissioners, boards of directors, and women's audit committees did not have a significant effect on reducing agency costs. Institutional ownership and boards of directors have a significant effect on reducing agency costs.

Keywords: Independent Board Of Commissioners, Board Of Directors, Audit Committee, *Agency Cost*.

PENDAHULUAN

Era globalisasi telah menyebabkan banyak perubahan yang terjadi begitu cepat di dalam bisnis, di mana pasar semakin kompetitif sehingga menuntut perusahaan-perusahaan untuk beradaptasi dan memiliki ketahanan. Perusahaan-perusahaan bersaing satu sama lain dalam tujuannya untuk menjadi perusahaan yang dikenal baik dalam kinerja maupun citra positif di mata masyarakat. Tak dapat dipungkiri banyak sektor bisnis menghadapi persaingan yang begitu ketat. Salah satu bentuk dari persaingan positif yang dilakukan yaitu perusahaan berlomba-lomba memperbaiki tata kelola perusahaannya.

Tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan seperangkat prinsip yang diterapkan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan serta melakukan pengembangan dalam perusahaan yang ditujukan pengembangan dalam jangka panjang guna menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Salah satu peran GCG dapat dilihat pada perangkat kepengurusan perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang optimal dan efisien diyakini dapat terus memperkuat posisi daya saing perusahaan dengan perusahaan lain, mengendalikan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan investor.

Di Indonesia, hubungan antara laki-laki dan perempuan masih didominasi dan dipengaruhi dengan ideologi gender sehingga muncul budaya patriarki yang telah melekat turun-temurun. Contoh sederhana yaitu di dalam sebuah keluarga pada umumnya, seorang suami menjadi kepala keluarga yang akan mengayomi istri dan anak-anaknya. Sistem patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan atau yang mendominasi serta melakukan perihal apapun. Begitu pula di lingkungan kerja, posisi perempuan sering dianggap sebagai minoritas dan laki-laki yang mendominasi di setiap jabatan mulai dari pegawai hingga direktur. Namun seiring perkembangan zaman, budaya patriarki mulai bergeser. Hal tersebut telah terjadi sejak emansipasi wanita berlangsung. Wanita juga memiliki hak untuk menjadi pemimpin, melakukan pekerjaan, serta mendapatkan pendidikan yang layak.

Setiap perusahaan Perseroan Terbatas (PT) memiliki struktur organisasi yang dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu pemegang saham, direksi dan komisaris di mana telah memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2006, komisaris independen adalah pihak yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan maupun pihak yang terlibat di dalamnya, yang bertugas mengawasi keputusan manajerial dan operasional perusahaan, memberikan nasihat kepada direksi, serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (Pratiwi & Yulianto, 2016). Dengan demikian, Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan maupun pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga dapat bertindak secara independen dalam mengawasi tindakan manajer. Dengan adanya dewan komisaris independen, diharapkan dapat melindungi serta mengendalikan pihak-pihak di luar manajemen, menengahi perselisihan antara manajer internal dan melakukan pengembangan dalam tata kelola perusahaan.

Selain itu, pengungkapan GCG perusahaan dilaksanakan oleh direksi di mana berpegang pada persetujuan dewan komisaris sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012. Maka dari itu, direksi dan dewan komisaris mempunyai peranan yang relevan dalam peningkatan transparansi perusahaan. Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris bukan hanya berkaitan dengan kinerja perusahaan dalam kurun waktu tertentu, melainkan pada laporan tahunan yang disampaikan.

Perkembangan pada perusahaan sektor pertambangan juga menimbulkan masalah-masalah baru, salah satunya masalah keagenan. Adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan menimbulkan hubungan keagenan. Jensen & Meckling, (1976) dalam Pratiwi & Yulianto, (2016) mengungkapkan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana salah satu pihak (prinsipal) meminta kepada pihak lain (agen) untuk melakukan jasa dan memberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan atas namanya. Adanya pemisahan fungsi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan menyebabkan biaya keagenan tidak mungkin dihindari. Dengan demikian, semakin tinggi kepemilikan manajerial akan mengarah pada menurunnya konflik diantara manajer dan pemegang saham sehingga masalah keagenan menurun dan biaya keagenan juga menurun. Perusahaan untuk memperkecil konflik keagenan tersebut harus mengeluarkan biaya yang kemudian dinamai dengan biaya keagenan atau *agency cost* (Budiarti, dkk, 2014 dalam Gunawan, 2022).

Pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) yang optimal diyakini mampu mengurangi masalah keagenan. Sudana (2015) dalam Pratiwi & Yulianto (2016) menyatakan bahwa penunjukan komisaris independen merupakan salah satu mekanisme pengawasan guna mengurangi perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Dengan adanya dewan komisaris independen, dewan direksi serta komite audit yang saling berkaitan satu sama lain dalam menjalankan GCG diharapkan mampu mengurangi biaya keagenan yang terjadi di suatu perusahaan.

Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya keagenan sehingga semakin tinggi proporsi komisaris independen dari jumlah dewan komisaris, maka biaya keagenan akan meningkat (Pratiwi & Yulianto, 2016). Sedangkan menurut Gunawan (2022), komisaris dewan independen tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan terkhususnya di perusahaan manufaktur. Hal ini disebabkan bahwa kinerja komisaris dewan independen sendiri belum maksimal dan komisaris independen tidak dapat menangkap secara maksimal biaya keagenan yang diukur dengan *asset turnover*.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori utama dalam manajemen perusahaan, di mana mulai berlaku apabila terjadi pemisahan antara pemilik (pemegang saham) dan manajemen perusahaan (Rahardjo, 2019). Dalam hal ini, pemilik berperan sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen. Tanggung jawab dan wewenang dilimpahkan oleh pemegang saham kepada manajemen dengan maksud untuk mengelola perusahaan yang mereka miliki. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan oleh Perseroan Terbatas, direksi dan komisaris diangkat sebagai bagian dari perangkat sebuah organisasi. Direksi merupakan manajemen, sedangkan komisaris merupakan perangkat untuk memantau bagi stakeholders dalam konteks UU Perseoran Terbatas.

Teori keagenan memperluas perspektif pembagian risiko ke dalam masalah keagenan, yaitu apabila pihak-pihak yang bekerja sama mempunyai tujuan yang berbeda dan terdapat pembagian kerja di antara mereka. Masalah keagenan muncul jika keinginan dan tujuan dari prinsipal dan agen saling bertentangan. Hal ini menyebabkan prinsipal harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk kepentingan ini. Teori keagenan dapat berakhir pada penyusunan kontrak antara pihak-pihak terkait saling bekerja sama. Kontrak yang dibentuk bertujuan sebagai bagian dari persetujuan yang saling mengikat, sekurang-kurangnya mengandung insentif yang dijanjikan dan sistem monitoring yang disepakati. Insentif yang diberikan ditujukan pada salah satu pihak (biasanya agen) agar melakukan/ tidak melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh pihak lain (prinsipal) yang dimuat dalam kontrak tersebut.

Mekanisme Good Corporate Governance

Standar atau kode etik merupakan bagian dari mekanisme tata kelola. Standar dan kode etik dikeluarkan oleh profesi akuntan, profesi akuntan publik, konsultan hukum, profesi aktuaris, *appraisal company*, dan *business valuer*. Sistem prosedur dari internal perusahaan dapat berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, piagam-piagam dan sistem pengendalian internal. Regulasi otoritas, standar profesi, kebijakan, dan prosedur perusahaan harus saling mendukung satu sama lain secara terintegrasi untuk tercapainya sistem tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan dari mekanisme tata kelola yang baik adalah menghasilkan sistem pertanggungjawaban keuangan yang memadai dari perusahaan kepada *stakeholder*.

Komisaris

Fungsi pengawasan dalam perseroan terbatas dilakukan oleh dewan komisaris. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 33 Tahun 2014 mengharuskan dewan komisaris terdiri atas kurang lebih 2 orang anggota. Satu di antara anggota dewan komisaris menjadi komisaris utama atau presiden komisaris. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya hingga mengakibatkan kerugian bagi perseroan, tanggung jawab pribadi yang diakibatkan menjadi tanggung jawab renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau dewan komisaris lainnya, sebagaimana diatur dalam UUPT Pasal 120 ayat 1. Selain syarat yang harus dipenuhi sebagai anggota dewan komisaris pada umumnya, syarat untuk menjadi komisaris independen ditambah dengan:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emitmen atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emitmen atau perusahaan publik tersebut.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emitmen atau perusahaan publik, anggota direksi atau pemegang saham utama emitmen atau perusahaan publik.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emitmen atau perusahaan publik.

Dewan Direksi

Peraturan dalam Otoritas Jasa Keuangan Nomo 33/PJOK.04/2014 mendefinisikan direksi sebagai suatu organ atau emiten perusahaan publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan emiten (Rahardjo, 2019). Otoritas Jasa Keuangan mengharuskan bahwa direksi paling tidak terdiri atas dua orang.

Tugas utama direksi adalah memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan menjamin keberlangsungan perseroan. Peningkatan nilai tambah bagi pemegang saham tercermin pada laba yang diperoleh. Lalu laba ini dapat dibagiakan kepada pemegang saham yang disebut dengan dividen. Bentuk pertanggungjawaban direksi terletak pada disampaikannya laporan tahunan perusahaan yang adalah benar. Direksi bersama dengan komisaris harus bebas dari upaya memanipulasi laporan keuangan yang melawan hukum.

Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dewan komisaris dapat membentuk komite yang bertanggung jawab terhadapnya, salah satu komite tersebut ialah komite audit. Komite audit diharapkan dapat meningkatkan peran pengawasan dewan komisaris terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan dan perancangan serta implementasi sistem pengendalian internal yang baik. Komite audit juga dapat membantu menelaah ketepatan dan kecukupan perancangan dan implementasi manajemen risiko yang diterapkan perusahaan apabila tidak dibentuk komite pemantau risiko (Rahardjo, 2019).

Dalam hal melaksanakan tugasnya, komite audit harus berhubungan koordinatif secara intensif dengan direksi yang membawahi bagian-bagian lain dengan tujuan memperoleh pemutakhiran dari direktur yang membawahi operasional perusahaan. Komite audit juga berkoordinasi dengan bagian yang menangani masalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam penerapan GCG perusahaan.

Agency Cost

Biaya keagenan atau *agency cost* merupakan biaya transaksi yang sering timbul dari kaitan antara teori keagenan dan teori organisasi (Rahardjo, 2019). Kedua teori ini memiliki pandangan yang sama mengenai kepentingan pribadi dan rasionalitas. Biaya keagenan memiliki variabel-variabel tidak bebas yang terdiri atas hierarki yang hampir sama dengan kontrak berdasarkan perilaku dan pasar yang berkaitan dengan kontrak tersebut berdasarkan hasil. Tujuan dari kedua variabel ini adalah tentang efisiensi. Teori organisasi menitik beratkan biaya diletakkan pada batas-batas organisasi, sedangkan teori keagenan berpusat pada kontrak antara pihak-pihak yang saling bekerja sama.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah, landasan teori, dan kerangka yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. Porsi Dewan Komisaris Independen Perempuan pada *Agency Cost*

Dalam posisi komisaris, perempuan menjadi gender yang lebih direkomendasikan untuk menempati posisi ini. Hal tersebut karena wanita memiliki jiwa perhitungan dan leadership yang kuat selain itu wanita juga peka terhadap hal kecil yang dapat membahayakan bagi kedepannya. Hal tersebut dengan setidaknya komisaris didalam suatu perusahaan pasti ada yang bergender wanita sebagai pemimpin dalam hal tertentu.

Peranan dewan komisaris perempuan dalam *agency cost* adalah untuk memperhitungkan jumlah-jumlah biaya *agency* yang biasanya memang dikeluarkan perusahaan untuk kepentingan dan keperluan perusahaan serta menekan dan membuang biaya-biaya yang tidak diperlukan atau meniadakan kegiatan yang tidak menimbulkan masalah jika ditiadakan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pengeluaran biaya keagenan yang terlalu berlebihan. Berdasarkan pemaparan tersebut maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H1 = Porsi dewan komisaris independen perempuan berpengaruh negatif pada *agency cost*.

2. Porsi Dewan Direksi Perempuan pada *Agency Cost*

Dewan direksi dapat digunakan sebagai sarana untuk memantau manajemen dan memastikan bahwa manajemen berjalan dengan efektif. Meskipun peran perempuan di dewan direksi dan komisaris berada di posisi minoritas, kehadiran mereka mungkin belum terlalu dipandang setara dalam perusahaan (Anggraeni, 2020). Perempuan diyakini lebih baik daripada laki-laki dalam hal perilaku etis, diskriminasi terhadap perempuan dalam posisi kepemimpinan menghalangi mereka untuk menghasilkan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih baik.

Direksi wanita cenderung memilih untuk menahan kas selama adanya ketidakpastian pasar untuk melindungi keuangan perusahaan. Perubahan ekonomi menjadi salah satu risiko terbesar yang kerap dihadapi oleh manajemen. Perubahan tersebut sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh manajemen. Adanya ketidakpastian pasar menyebabkan risiko tersebut sulit untuk diprediksi sehingga direksi wanita akan cenderung menahan arus kas keluar. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis yang ketiga sebagai berikut:

H2 : Porsi dewan direksi perempuan berpengaruh negatif terhadap *agency cost*.

3. Porsi Dewan Komite Audit Perempuan Berpengaruh pada *Agency Cost*

Komite audit yang dijabat oleh perempuan cenderung menunjukkan pilihan yang lebih aman dalam pengambilan keputusan. Perempuan dinilai memiliki karakter yang sesuai dalam posisi ini dikarenakan perempuan memiliki sifat jujur, teliti dan terperinci dalam menjalankan suatu hal sesuai dengan prosedur yang ada. Oleh karena itu, keefektifan komite audit juga dipengaruhi oleh karakteristik perempuan yang cenderung menunjang kinerja manajemen dan tata kelola perusahaan yang akan berpengaruh dalam mengurangi biaya agensi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis yang ketiga sebagai berikut:

H3 : Porsi dewan komite audit perempuan berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan.

METODE PENELITIAN

Karakteristik riset

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan riset asosiatif. Menurut (Sujarweni 2015, 16) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dengan penelitian ini maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menganalisis data-data secara kuantitatif atau statistik, tujuannya untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan lalu menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk menarik kesimpulan. Jenis penelitian kuantitatif dalam penelitian ini adalah mengolah data terkait porsi perempuan dalam mekanisme GCG terhadap *agency cost* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018) populasi merupakan keseluruhan elemen dari obyek yang karakteristiknya akan diuji. Adapun sampel merupakan bagian populasi yang karakteristiknya hendak diuji. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu *Judgment sampling* yang merupakan bagian dari *purposive sampling*. *Judgment sampling* merupakan bagian dari *purposive sampling* dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu (Hartono, 2014). Salah satu hal yang menjadi bentuk pertimbangan dalam penelitian tersebut, yaitu perusahaan sektor pertambangan yang sudah *go-public* dan terdaftar di BEI.

Pada penelitian ini kami memilih sampel berdasarkan kriteria maupun karakteristik yang disesuaikan dengan penelitian kriteria sebagai berikut Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan berurut selama periode pengamatan dari tahun 2019-2021.

Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu data sekunder. Menurut Sugiyono (2018) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data yang akan diolah merupakan data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari berbagai sektor akan disortir sesuai dengan sektor yang dipilih, yaitu sektor pertambangan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menandakan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sehat dan dengan *value* yang tinggi.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas:

Dewan komisaris independen perempuan (X1)

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang bisa mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dewan Komisaris dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dalam suatu perusahaan. Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh dewan komisaris independen yaitu mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel data dewan komisaris independen perempuan menggunakan metode skoring dengan memberikan skor terhadap masing-masing nilai parameter, dengan kriteria skor untuk perempuan adalah 1 (satu) dan laki-laki adalah 0 (nol).

Dewan Direksi Perempuan (X2)

Dewan direksi merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh dalam perusahaan. Dewan Direksi memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja perusahaan terutama dalam hal mengelola informasi yang ada di perusahaan yang akan digunakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Dewan direksi perempuan dapat diukur dengan cara :

$$\text{Dewan direksi perempuan} = \frac{\text{Jumlah seluruh dewan direksi perempuan}}{\text{Jumlah dewan direksi}}$$

Komite Audit Perempuan (X3)

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu tugas dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada para direksi disaat sedang mengelola perusahaan. Komite audit diukur dari banyaknya anggota komite audit dalam perusahaan.

$$\text{Komite audit perempuan} = \frac{\text{Jumlah komite audit perempuan}}{\text{Total komite audit}}$$

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Biaya Keagenan (Agency cost). Agency cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham perusahaan untuk mengatur serta mengawasi tindakan pihak manajemen sehingga pihak manajemen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan memunculkan adanya hubungan keagenan. Jensen & Meckling (1976) dalam Pratiwi & Yulianto (2016) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana salah satu pihak (prinsipal) meminta kepada pihak lain (agen) untuk melakukan jasa dan memberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan atas namanya.

Agency cost timbul karena adanya konflik perbedaan kepentingan antara pemilik atau pemegang saham dengan manajemen/ manajer (agen). Hal ini bisa terjadi karena manajer lebih banyak mengetahui mengenai perusahaan dibandingkan pemilik, pemilik lebih memfokuskan dalam memaksimalkan laba perusahaan sedangkan manajer dapat melakukan cara untuk meningkatkan manajemen laba dan manajer bisa melakukan manajemen laba sehingga laba yang diperoleh perusahaan seolah-olah meningkat. Dengan demikian pemilik mengeluarkan biaya untuk mengawasi perusahaannya biaya yang timbul tersebut dinamakan biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Setyaningsih (2017:89-90) dalam Hatang & Hapsari (2020) biaya keagenan dapat diukur dengan menggunakan proksi *Asset turnover*. *Asset turnover* (ATO) merupakan rasio efisiensi biaya artinya perusahaan yang memiliki ATO rendah menunjukkan bahwa manajer tidak secara efektif dalam mengelola aset yang optimal yang berarti *agency cost* perusahaan tersebut tinggi. ATO dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{TATO} = \text{Penjualan Bersih} / \text{Total Aset Rata-rata}$$

Teknik Analisis

Statistik Deskriptif

Deskriptif menurut Ghozali (2006), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi)

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen, keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Ada dua cara untuk melakukan uji normalitas yaitu dengan grafik dan uji statistik. Analisis grafik analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram dan *normal probability plot*. Analisis statistik uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *kolmogorov - smirnov* (*K S*).

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat (dependen). Model analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) (Ghozali, 2018:95).

Uji Hipotesis

4. Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Uji statistik F disebut dengan uji anova. Uji ini berguna dalam melihat hubungan antara variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian, uji statistik F pengujian dilakukan dengan menetapkan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan ketentuan:

- Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_a . Hal ini memperlihatkan koefisien regresi yang tidak signifikan. Artinya, secara bersama-sama variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Hal ini berarti koefisien regresi signifikan dan variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi pengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen (Ghozali, 2018:9). Pengujian ini dilakukan dengan kriteria apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima dan apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak.

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kuantitatif. Pengujian pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat hubungan antara hipotesis yang diperoleh dengan variabel yang akan diujikan sehingga peneliti bisa melihat bagaimana pengaruh secara signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data (Hartono, 2014). Statistik deskriptif akan memberikan gambaran umum setiap variabel penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai terendah (*min*), dan nilai tertinggi (*max*) dari dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit yang merupakan perempuan saat menjabat dan *agency cost* perusahaan di sektor pertambangan tahun 2019-2021.

Uji Normalitas Data

Dari pengujian tersebut, nilai signifikansi variabel KI sebesar $0,000 < 0,05$, nilai signifikansi variabel DD sebesar $0,000 < 0,05$, nilai signifikansi variabel KA sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai signifikansi variabel AC sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal karena semua variabel menunjukkan nilai $\text{sig} < 0,05$.

Pengujian Asumsi Klasik

Normalitas Residual

Dalam pengujian normalitas residu yang akan diterima adalah H_0 . Maka nilai signifikansi harus $> 0,05$. Dapat dilihat dari tabel tersebut data menunjukkan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa normalitas residual tidak berdistribusi normal.

Multikolinieritas

Dari tabel di atas, diperoleh nilai *R Square* dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah 0,04. Sedangkan nilai yang diperoleh pada variabel Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit masing-masing sebesar 0,00, 0,04, 0,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa $R_2, R_3, R_4 \leq R_1$ maka tidak terjadi multikolinieritas. (Setiap individu variabel independen ke dependen harus lebih rendah dari *R Square* regresi ketiga variabel terhadap variabel independen)

Uji Heterokedastisitas (Glejser)

Nilai signifikansi KI, DD, KA berturut-turut sebesar 0,029, 0,895 dan 0,000 maka model regresi tersebut ditemukan masalah heterokedastisitas pada salah satu variabel yakni Dewan Direksi yang memiliki nilai sig $< 0,05$.

Autokorelasi (Time Series) Run Test

Pada tabel di atas, nilai *Assymp. Sig* sebesar $0,000 < 0,05$ dan dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah multikolinieritas pada *data time series*.

Uji Hipotesis/Hasil

1. Uji F

Uji F dilakukan dengan menetapkan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan ketentuan :

- a. Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_a .
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

Berdasarkan data tersebut, nilai sig sebesar $0,68 > 0,05$ sehingga model regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi signifikan. H_0 ditolak dan H_a diterima, variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi pengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji T

Kriteria dari uji T yaitu apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima dan apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak.

Hasil dari Uji T di atas adalah sebagai berikut :

- a. Variabel Komisaris Independen memiliki nilai B sebesar 0,012 dan nilai signifikansi sebesar 0,981. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak.
- b. Variabel Dewan Direksi memiliki nilai B sebesar 2.325 dan nilai signifikansi sebesar 0.009. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji T pada hipotesis kedua diterima.
- c. Variabel Komite Audit memiliki nilai B sebesar 0.039 dan nilai signifikansi sebesar 0.955. Nilai signifikansi lebih besar dari 0.500 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak.

Bootstrapping

Bootstrapping merupakan prosedur statistik yang dilakukan sebagai alternatif apabila data tidak berdistribusi normal dan jumlah sampel terbatas. *Bootstrapping* dilakukan dengan cara mengubah data dari sampel yang kita peroleh dan melakukan replikasi dari data sampel tersebut (*resampling*) secara acak untuk diperoleh data simulasi baru. Data yang ditunjukkan merupakan hasil *re-sampling* dari 180 perusahaan menjadi 1.000 sampel dan diregresikan menggunakan aplikasi SPSS.

Analisis Hasil

Berdasarkan hasil olah data statistik yang telah kami lakukan terhadap sampel-sampel penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa hasil yang ditunjukkan tidak berdistribusi normal dan mengacu hipotesis-hipotesis ditolak, sehingga kami mencoba menelusuri kontribusi tenaga kerja formal wanita dari www.bps.go.id pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Jika dilihat berdasarkan persentase tersebut memang tenaga kerja laki-laki masih lebih banyak daripada wanita. Hal ini sejalan pula dengan posisi komisaris independen, dewan direksi serta komite audit dalam perusahaan sector pertambangan yang masih didominasi oleh laki-laki.

Komite Audit diukur menggunakan skala rasio melalui presentase anggota komite audit yang berasal dari luar komite audit terhadap seluruh anggota komite audit. Komite audit (KA) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai keagenan (*agency cost*). Komite audit tidak menjamin bahwa perusahaan akan memiliki kinerja yang semakin baik, karena komite audit belum menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal melainkan hanya sebagai keinginan perusahaan untuk mematuhi peraturan. Dengan fungsi pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara optimal oleh komite audit perempuan maka keberadaannya tidak mempengaruhi biaya keagenan (*agency cost*).

Salah satu peran dari dewan direksi yaitu menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang guna meningkatkan kinerja perusahaan dan untuk memenuhi peran ini dibutuhkan jiwa kepemimpinan yang tegas dan disiplin. Hingga saat ini masih terdapat stigma/ pandangan dari masyarakat bahwa laki-laki cenderung dapat lebih memimpin karena memiliki karakteristik yang tegas. Sehingga kesempatan bagi perempuan untuk menjabat posisi sebagai dewan direksi belum terlalu banyak. Karena peran wanita yang menjabat sebagai dewan direksi masih sedikit, maka keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka menekan *agency cost* perusahaan belum terlihat jelas.

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa tidak terdapat pengaruh dari porsi dewan komisaris independen perempuan, dewan direksi perempuan, dan komite audit perempuan perusahaan sektor pertambangan terhadap *agency cost* dari tahun 2019-2021. Hal ini berarti peran perempuan terhadap posisi dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit belum tampak secara nyata terhadap biaya keagenan yang timbul hampir di setiap perusahaan.\

Keterbatasan

Keterbatasan dalam melakukan penelitian tersebut, yaitu keterbatasan terkait artikel dan penelitian terdahulu karena teori *agency cost* jarang diteliti oleh peneliti terdahulu, serta bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperluas cakupan penelitian sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih jelas dan terkini.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, implikasi penelitian dalam penulisan tersebut, yaitu biaya *agency* suatu perusahaan terjadi tergantung dari bagaimana tata kelola perusahaan tersebut serta pemimpin perempuan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap terjadinya biaya keagenan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. (2020). Gender, Komisaris Independen, Ukuran Dewan, Komite Audit, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1–16. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p16>
- Gunawan, A. (2022). Peranan Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Dalam Meminimalisir Biaya Keagenan Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. *Owner*, 6(3), 1–12. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.954>
- Hafsyah, A. N., Mersela, M., & Lestari, H. S. (2022). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Agency Cost Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ekonomi*, 27(1), 1–15. <https://doi.org/10.24912/je.v27i1.852>
- Hartono, J. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (6th ed.). BPFE.
- Hatang, D. J., & Hapsari, D. W. (2020). Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Dan Agency Cost. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2221>
- Pangestu, S., Gunawan, S., & Wijaya, J. S. (2019). The Presence and Characteristics of Female Directors: How They Influence Firm Performance. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.17358/ijbe.5.1.13>
- Pratiwi, R., & Yulianto, A. (2016). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Komisaris Independen terhadap Biaya Keagenan Perusahaan yang Masuk dalam Indonesia Most Trusted Companies. *Management Analysis Journal*, 5(3), 1–14.
- Rahardjo, S. S. (2019). *Etika Dalam Bisnis & Profesi Akuntan Dan Tata Kelola Perusahaan*. Salemba Empat.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*.
- Tosun, O. K., El Kalak, I., & Hudson, R. (2022). How female directors help firms to attain optimal cash holdings. *International Review of Financial Analysis*, 80, 1–20. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102034>